



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 18 Januari 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Evaluasi Penanganan Permasalahan Pertanahan; - Dan Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH. /Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 35 (tiga puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI dari 52 (lima puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda evaluasi penanganan permasalahan pertanahan dan lain-lain, hari Selasa, 18 Januari 2022, dibuka pukul 14.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda evaluasi penanganan permasalahan pertanahan dan lain-lain, sebagai berikut:

1. Salah satu tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2020 dan Perpres No. 48 Tahun 2020 adalah perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

2. Jumlah Sengketa, Konflik Perkara dan Kasus Kejahatan Pertanahan (Sengketa/Konflik yang mengandung unsur pidana) pada tahun 2021 di seluruh wilayah adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah kasus pertanahan total sebanyak 8.111 kasus
 - b. Target DIPA penanganan total sebanyak 1.744
3. Menteri ATR/BPN RI menyampaikan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN RI tahun 2021 sebesar 90,76%.
4. Penjelasan Menteri ATR/BPN RI menyampaikan hasil penanganan kasus pertanahan sebanyak 8.111 kasus dan dapat menyelesaikan sejumlah 1.591 kasus.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda evaluasi penanganan permasalahan pertanahan dan lain-lain, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN menyepakati rapat kerja pada hari ini akan dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 2022.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.05 WIB.

 Jakarta, 18 Januari 2022
KETUA RAPAT

Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH.
A-142